

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jumlah pengguna internet di Indonesia telah menempati posisi ke-6 di dunia dengan total pengguna sebesar 83,7 juta jiwa dan telah diramalkan akan terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya [1]. Internet telah menjadi alat komunikasi dunia bagi manusia dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan murah, serta memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengakses informasi [2].

Teknologi informasi baik di Indonesia maupun dunia menghadapi peningkatan cukup signifikan terhadap pesatnya perkembangan pengguna internet dan *gadget* pada masyarakat [1]. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berperan dalam pengolahan dan pemrosesan data, seperti menyimpan, menyusun, memanipulasi data untuk dapat menghasilkan informasi yang akurat dan relevan yang kemudian digunakan dalam berbagai keperluan baik dalam konteks pribadi, bisnis, atau bahkan pemerintahan [3]. Teknologi informasi sudah menjadi suatu hal yang penting karena telah banyak organisasi yang sudah menerapkannya, termasuk dalam organisasi pemerintahan. Penerapan teknologi informasi dalam organisasi pemerintahan bertujuan untuk mendukung kepentingan organisasi tersebut [4].

Pemerintahan di Kabupaten Purbalingga bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) telah menerapkan teknologi informasi berbasis *website* untuk melakukan pelaporan berdasarkan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap pegawai maupun pihak lainnya dalam organisasi tempat pelapor bekerja yang bernama *Whistle Blowing System* (WBS) dan beralamatkan pada [wbs.purbalinggakab.go.id](http://wbs.purbalinggakab.go.id).

Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan *whistle blowing system* berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mengatur mengenai optimalisasi dan peningkatan efektifitas *whistle blowing system*.

*Whistle Blowing* merupakan elemen terpenting untuk dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas publik. Berbagai tindakan tidak etis yang dilakukan oleh para birokrat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti korupsi, maladministrasi, ketidak tepatan dalam pengelolaan keuangan negara, dan berbagai keputusan birokrat yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebelum adanya *whistle blowing system* laporan tersebut disampaikan melalui media massa. Namun, media massa tidak ada kewajiban untuk melakukan investigasi terhadap tindakan tersebut dan media massa tidak memiliki mekanisme perlindungan terhadap pelapor yang melaporkan tindakan tidak etis tersebut [5].

Berdasarkan permasalahan yang ada dan hasil diskusi yang dilakukan dengan pembimbing lapangan, menyatakan bahwa *website whistle blowing system* Kabupaten Purbalingga masih dalam bentuk *template* dari Wordpress dan masih terdapat beberapa fitur yang belum dimiliki. Dalam sisi pengguna sebagai masyarakat belum memiliki fitur *register*, *login*, dan melihat status pengaduan. Sedangkan dari sisi admin belum diterapkan oleh pihak Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, sehingga belum bisa menanggapi pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Adanya *website whistle blowing system* di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan tindak pidana korupsi bagi tenaga kerja disuatu organisasi atau masyarakat Kabupaten Purbalingga. Selain itu, dapat mempermudah pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengetahui tindakan tidak etis tersebut dan dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

## **B. Tujuan**

### **1. Tujuan Pelaksanaan PKL/KP**

Tujuan dari pelaksanaan PKL/KP sebagai berikut :

- a. Memahami gambaran secara nyata di dunia kerja yang sebenarnya
- b. Mengukur keterampilan diri saat bekerjasama dengan tim
- c. Meningkatkan *softskill* dan *hardskill* dalam diri

- d. Mendapatkan ilmu baru baik dari pembimbing lapangan ataupun pihak lainnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

## 2. Tujuan Pembuatan Laporan PKL/KP

Tujuan dalam pembuatan laporan PKL/KP sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat kelengkapan dalam kegiatan PKL/KP dan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah di Program Studi S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto
- b. Sebagai arsip penulis atas kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan

## C. Ruang Lingkup

PKL/KP terlaksana dalam rentang waktu 1 bulan yang terhitung dari 8 Agustus 2022 sampai dengan 9 September 2022 dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang beralamatkan di Jl. Letkol Isdiman No. 17A, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, laporan PKL/KP ini memiliki ruang lingkup atau batasan agar dalam pembahasannya lebih fokus dan terarah dan tidak terlalu melebar. Ruang lingkup laporan PKL/KP ini yaitu berdasarkan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan untuk melakukan *redesign* pada *website whistle blowing system* Kabupaten Purbalingga baik dari segi *font-end* maupun *back-end* nya untuk melengkapi fitur-fitur yang belum teralisasiikan dalam *website*.

## D. Aspek Umum dan Kelembagaan

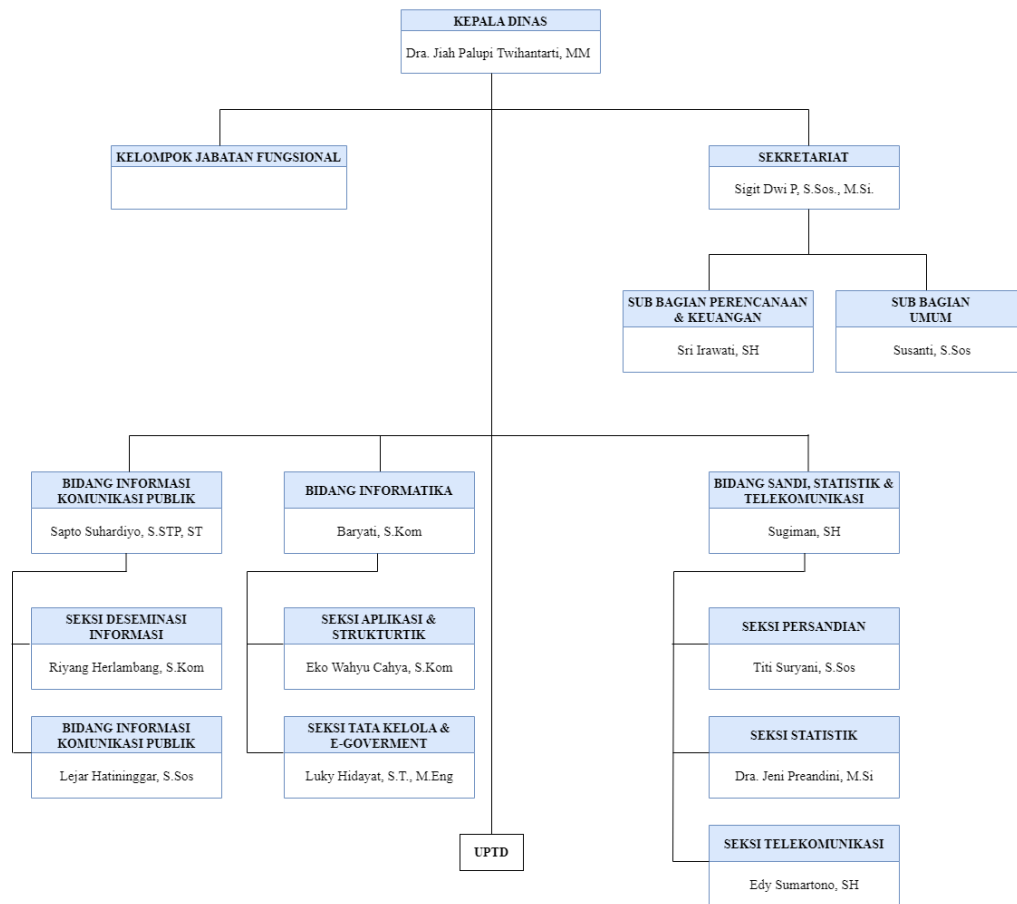
### 1. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dilansir dari situs *website* resmi telah menjelaskan bahwa terwujudnya implementasi *e-government* menjadi tujuan yang diharapkan dalam bidang pemerintahan termasuk pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika atau lebih dikenal dengan Dinkominfo. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) memiliki tugas utama yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga beralamatkan di Jl. Letkol Isdiman No. 17A, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dengan nomor kantor : (0281) 8902091 dan email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id.

## **2. Unit-unit Kerja atau Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga**

Pada Gambar 1. 2 dibawah merupakan struktur organisasi atau struktur kelembagaan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tercantum dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

## E. Metode Penulisan Laporan

Penyusunan laporan PKL/KP, terdapat beberapa metode yang digunakan penulis, diantaranya :

### 1. Kajian Literatur

Kajian literatur dilakukan penulis dengan cara mengkaji dari berbagai sumber yang ada, seperti jurnal, buku, internet guna mempermudah penulis dalam penyusunan laporan PKL/KP.

### 2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan proses tanya jawab kepada pembimbing lapangan terkait hal-hal yang berkaitan dengan *website whistle blowing system* di Kabupaten Purbalingga.

### 3. Diskusi

Diskusi dilakukan secara langsung terhadap penulis maupun pembimbing lapangan guna menganalisa serta mencari solusi dari permasalahan pada *website whistle blowing system* di Kabupaten Purbalingga.

## F. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan laporan PKL/KP terdapat Sistematika Penulisan yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam pembacaan dan pemahaman laporan, sehingga laporan PKL/KP ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan berisikan gambaran umum dalam permasalahan pada objek yang dituangkan dalam bentuk latar belakang, tujuan, aspek umum kelembagaan, metode penulisan dan sistematika penulisan laporan dalam pelaksanaan PKL/KP.

### **BAB II     LANDASAN TEORI**

Bagian landasan teori berisikan mengenai teori-teori yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan PKL/KP. Teori-teori yang digunakan didapatkan dari berbagai jurnal serta disesuaikan berdasarkan judul dalam penyusunan laporan PKL/KP.

### **BAB III    PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian perancangan dan pembahasan berisikan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PKL/KP dan pembahasan mengenai hasil *project* yang dikerjakan selama PKL/KP yaitu *Redesign Website Whistle Blowing System* (WBS) Sebagai Media Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga.

### **BAB IV    PENUTUP**

Bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil akhir yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan PKL/KP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.